

LAPORAN BULANAN

POKJA PAPUA PRODUKTIF

BPPP

BADAN PENGANTARA PAPUA



PERIODE FEBRUARI 2026



KEGIATAN-KEGIATAN STRATEGIS



KEGIATAN STRATEGIS PAPUA PRODUKTIF

INDIKATOR PEMBANGUNAN PAPUA PRODUKTIF

Tingkat Kemiskinan

20,66%

Baseline (2022): 21,33
Target (2024): 19,03



TPT

4,85%

Baseline (2022): 5,37



Realisasi Investasi

Rp 14,52 Triliun

Baseline (2021): Rp919,07 M



AUDIENSI FORUM EKONOMI PAPUA PRODUKTIF DAN PERDAMAIAN



Tanggal, 04 Februari 2026



Gedung Keaungan Negara Manokwari

BP3OKP Papua Barat bersama seluruh Pokja menggelar dialog konstruktif dengan Forum Ekonomi Papua Produktif dan Perdamaian. Forum ini berfokus pada penyelarasan pemahaman kebijakan percepatan pembangunan Papua (RIPPP dan RAPPP), identifikasi potensi dan permasalahan ekonomi lokal, serta pembangunan komitmen bersama dalam mendorong ekonomi kerakyatan berbasis budaya Papua.



CAPAIAN

1. Teridentifikasinya isu strategis ekonomi lokal Papua Barat yang perlu ditindaklanjuti.
2. Kesepahaman bersama terkait arah kebijakan RIPPP dan RAPPP dalam konteks ekonomi daerah.
3. Komitmen kolaborasi BP3OKP dan Forum Ekonomi Papua untuk program tindak lanjut.



KOLABORASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA BERKELANJUTAN

Badan Pengarah Papua melaksanakan pertemuan bersama Gubernur dari 6 provinsi di Tanah Papua dan . Kegiatan tersebut digelar di Kabupaten Manokwari pada 12-13 Februari 2026,.

Pertemuan yang melibatkan para Gubernur dari 6 Provinsi di tanah Papua adalah: Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya. Pertemuan ini membahas berbagai isu strategis, mulai dari penguatan konektivitas antarwilayah, Peningkatan kualitas Pendidikan, dan Layanan Kesehatan Pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal hingga Perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari komitmen pembangunan berkelanjutan.

✓ CAPAIAN

- Tersusunnya Berita Acara Kesepakatan Bersama •
- Komitmen kolaborasi di 6 provinsi dalam percepatan pembangunan Papua



POIN-POINT PENTING

Tujuan Utama: Memperkuat kolaborasi untuk mempercepat pembangunan berkelanjutan yang memprioritaskan manusia, alam, dan nilai lokal.

Konektivitas & Pembangunan: Membahas konektivitas antarwilayah dan isu-isu strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di enam provinsi Papua.

Sinergi Lingkungan: Pertemuan ini juga menjadi bagian dari rangkaian *International Conference on Nature-Based Climate Solutions* untuk menonjolkan peran Papua dalam penanganan perubahan iklim.

Integrasi Kebijakan: Mendorong komitmen yang tidak terfragmentasi, melainkan terpadu dalam kerangka enam provinsi (Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya).

KEGIATAN STRATEGIS BERSAMA

AUDIENSI BP3OKP DAN BADAN PUSAT STATISTIK PAPUA BARAT

BP3OKP Papua Barat hadir dalam press release yang di laksanakan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat, dengan beberapa agenda, diantaranya: Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi bulan Januari, Perkembangan nilai tukar petani (NTP) bulan Januari 2026, Perkembangan ekspor dan impor bulan Desember 2025, Perkembangan pariwisata bulan Desember 2025, serta Perkembangan transportasi udara bulan Desember 2025.

✓ TUJUAN

1. Menyebarkan data statistik dasar di Provinsi Papua Barat, yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik kepada pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya secara cepat, mudah, transparan, dan terstandar.
2. menyampaikan indikator strategis (inflasi, kemiskinan, NTP, ekspor-impor, pariwisata) sebagai bahan evaluasi kebijakan pemerintah, evaluasi kinerja pembangunan, dan acuan aktivitas ekonomi masyarakat



✓ CAPAIAN

Secara tahunan, inflasi tertinggi tercatat di Manokwari sebesar 5,02 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya variasi tekanan harga antar wilayah di Papua Barat.

Inflasi bulanan Papua Barat pada Januari 2026 terutama disumbang oleh kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang mengalami inflasi 1,02 persen dengan andil 0,36 persen. Komoditas penyumbang utama didominasi ikan segar, seperti ikan tuna, ikan cakalang, ikan kakap merah, dan ikan layang/momar.

Selain itu, kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya turut memberikan kontribusi inflasi dengan inflasi 1,75 persen dan andil 0,10 persen, terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga emas perhiasan.

Secara subsektor, peningkatan NTP tertinggi di Papua Barat terjadi pada subsector perikanan, yang naik 3,26 persen karena didorong oleh peningkatan harga hasil perikanan tangkap. Komoditas perikanan yang dominan memengaruhi kenaikan ini antara lain ikan cakalang, kakap, tembang, tenggiri, dan ikan lencang.

Nilai Ekspor Provinsi Papua Barat bulan November sebesar US\$313,43 juta, naik 15,17 persen dibandingkan November 2025. Nilai Impor Provinsi Papua Barat bulan Desember 2025 sebesar US\$4,96 juta, naik 100,00 persen dibandingkan November 2025

Perjalanan Wisatawan Nusantara (Wisnus) asal Papua Barat mencapai 76.905 perjalanan, sedangkan perjalanan Wisatawan Nusantara tujuan Papua Barat mencapai 85.623 perjalanan pada Oktober 2025. Pada Oktober 2025, perjalanan Wisatawan Nusantara (Wisnus) asal Papua Barat mencapai 76.905 perjalanan, sedangkan perjalanan Wisatawan Nusantara tujuan Papua Barat mencapai 85.623 perjalanan.

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Bintang pada bulan Oktober 2025 adalah sebesar 37,22 persen; TPK Hotel Non Bintang sebesar 19,25 persen; dan TPK Gabungan sebesar 25,51 persen. Rata-rata Lama Menginap Tamu (RLMT) Gabungan (domestik dan asing) di hotel bintang pada bulan Oktober 2025 adalah 2,12 hari.

Transportasi Udara Provinsi Papua Barat bulan Desember 2025: Jumlah Penerbangan dan Penumpang Kembali mengalami penurunan masing-masing sebesar 17,62 persen dan 33,91 dibandingkan November 2025.

TERIMA KASIH

BPPP

DAN PENGARAH PAPUA



1

Aspek Perencanaan

Menyelaraskan dokumen perencanaan daerah dengan RIPP 2022–2041 dan kebijakan nasional

ASPEK PERENCANAAN

02 Feb 2026

Rakor Teknis

 Gedung Keuangan Negara, Manokwari

Rapat Koordinasi Teknis Persiapan Kongres Bahasa Daerah Papua

BP3OKP Papua Barat berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) yang diselenggarakan Kemendikdasmen sebagai tindak lanjut Pra-Kongres Bahasa Daerah di Jakarta (2-5 Desember 2025). Forum ini membahas persiapan Kongres Bahasa Daerah yang direncanakan digelar di Jayapura. BP3OKP hadir sebagai representasi kepentingan pelestarian bahasa daerah Papua Barat, sekaligus memastikan sinkronisasi agenda bahasa daerah dengan misi Papua Cerdas dalam RIPP. Forum ini membahas persiapan Kongres Bahasa Daerah yang direncanakan digelar di Jayapura. BP3OKP hadir sebagai representasi kepentingan pelestarian bahasa daerah Papua Barat, sekaligus memastikan sinkronisasi agenda bahasa daerah dengan misi Papua Cerdas dalam RIPP.

✓ CAPAIAN

- BP3OKP Papua Barat mendukung penyelenggaraan Kongres Bahasa Daerah di Jayapura.
- Rakortek lanjutan dijadwalkan setelah Konsolidasi Nasional (Konsolnas).
- Rakorbang ditetapkan berlangsung di Jakarta pada 9-11 Februari 2026.



09–11 Feb 2026

Konsolnas

 Lokasi: PPSDM Kemendikdasmen, Bojongsari, Depok, Jawa Barat

Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah 2026 — Kemendikdasmen

BP3OKP Papua Barat hadir dalam Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2026 yang diselenggarakan Kemendikdasmen. Forum ini mempertemukan pemangku kepentingan pendidikan dari seluruh Indonesia untuk sinkronisasi program prioritas nasional peningkatan kualitas SDM. BP3OKP turut serta menyampaikan kebutuhan afirmatif pendidikan Papua Barat dan mendorong kebijakan yang berpihak pada wilayah 3T sesuai misi Papua Cerdas.

✓ CAPAIAN

- BP3OKP menyuarakan kebutuhan afirmatif pendidikan Papua Barat di forum nasional.
- Jaringan koordinasi dengan Kemendikdasmen diperkuat untuk tindak lanjut kebijakan Papua Cerdas.



ASPEK PERENCANAAN (lanjutan)

12–13 Feb 2026

Pertemuan Gubernur  Swiss-Bell Hotel, Manokwari

Pertemuan Gubernur se-Tanah Papua — Kolaborasi Percepatan Pembangunan Berkelanjutan

BP3OKP melakukan pertemuan dengan para Gubernur se-Tanah Papua untuk menyinergikan agenda pembangunan regional dengan dua event internasional: 12th International Flora Malesiana Symposium dan Forum Ekoregion Papua. Pertemuan ini menghasilkan rumusan kesepakatan bersama antar seluruh pemerintah provinsi dan lembaga pemangku kepentingan pembangunan daerah se-Tanah Papua untuk kolaborasi percepatan pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan RIPP.

✓ CAPAIAN

- Tersusunnya Berita Acara Kesepakatan Bersama lintas provinsi se-Tanah Papua.
- Teridentifikasinya prioritas bersama pembangunan berkelanjutan yang selaras RIPP.
- Komitmen kolaborasi lintas 6 provinsi dalam percepatan pembangunan Papua dikuatkan.



2

Aspek Penganggaran

Mengawal efektivitas Dana Otsus, DBH Migas, dan Dana Transfer ke Daerah

ASPEK PENGANGGARAN

25 Feb 2026

Rapat Koordinasi

 Aston Niu Hotel Manokwari

Rakor Penguatan Kapasitas & Kinerja Otonomi Khusus Papua Barat — Aspek Anggaran & RAPP

BP3OKP Papua Barat bersama Kemendagri, Kemenkeu, KPK, Bappenas, dan Kakanwil Perbendaharaan menggelar rapat intensif penguatan kapasitas dan kinerja Otsus 2026. Forum menghadirkan Ditjen Otda Kemendagri sebagai narasumber utama. Diskusi mendalam meliputi optimalisasi penyerapan Dana Otsus, percepatan realisasi program prioritas tiga pilar (Papua Sehat, Cerdas, Produktif), serta mekanisme evaluasi dan pelaporan Dana Otsus yang transparan dan akuntabel. BP3OKP berkomitmen memastikan setiap rupiah dana Otsus berdampak langsung bagi Orang Asli Papua. adapun juga terkait isu Kesehatan di Papua Barat, BP3OKP Papua Barat Ungkap Kondisi Darurat Kesehatan Hingga Ancaman Depopulasi OAP



26 Feb 2026

Rapat Koordinasi

 Gedung Keuangan Negara, Manokwari

Penguatan Kapasitas Otsus — Tata Kelola Dana & Pengawasan (Sesi DPRK & Mitra)

Melanjutkan agenda hari pertama, rapat lanjutan Penguatan Kapasitas Otsus digelar di Aula Kasuari GKN dengan peserta diperluas mencakup DPRP Fraksi Otsus dan DPRK. BP3OKP menegaskan komitmen pengelolaan Dana Otsus yang transparan dan berorientasi hasil nyata bagi masyarakat Papua Barat. fokus pada mekanisme penganggaran, pelaporan, dan evaluasi kinerja Dana Otsus melalui tiga pilar utama pembangunan Papua. Sebagai langkah mitigasi, BP3OKP mendorong penguatan sinergi antara pemerintah daerah dengan Badan Pengarah Papua.



✓ CAPAIAN

- Komitmen bersama Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengelolaan Otsus transparan dan akuntabel.
- Melalui tiga pilar utama Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, pembangunan dilanjutkan.



3

Aspek Pelaksanaan

Pendampingan langsung program prioritas nasional dan pemberdayaan masyarakat Papua

ASPEK PELAKSANAAN

04 Feb 2026

Audiensi

 Gedung Keuangan Negara, Manokwari

Audiensi Forum Ekonomi Papua Produktif dan Perdamaian

BP3OKP Papua Barat bersama seluruh Pokja menggelar dialog konstruktif dengan Forum Ekonomi Papua Produktif dan Perdamaian. Forum ini berfokus pada penyelarasan pemahaman kebijakan percepatan pembangunan Papua (RIPPP dan RAPPP), identifikasi potensi dan permasalahan ekonomi lokal, serta pembangunan komitmen bersama dalam mendorong ekonomi kerakyatan berbasis budaya Papua. Anggota BP3OKP Perwakilan Papua Barat menekankan pentingnya sinergi antara BP3OKP dan forum masyarakat dalam implementasi kebijakan.

✓ CAPAIAN

- Teridentifikasinya isu strategis ekonomi lokal Papua Barat yang perlu ditindaklanjuti.
- Kesepahaman bersama terkait arah kebijakan RIPPP dan RAPPP dalam konteks ekonomi daerah.
- Komitmen kolaborasi BP3OKP dan Forum Ekonomi Papua untuk program tindak lanjut.



19 Feb 2026

Audiensi

 Gedung Keuangan Negara, Manokwari

Audiensi NPCI Papua Barat — Dukungan Olahraga Disabilitas

BP3OKP Papua Barat menggelar audiensi kedua dengan Nasional Paralimpik Komite Indonesia (NPCI) Provinsi Papua Barat sebagai tindak lanjut surat disposisi dari Wakil Presiden RI. Pertemuan ini sebagai dukungan dan komitmen BP3OKP terhadap pengembangan olahraga paralimpik, termasuk fasilitasi pembinaan atlet difabel OAP, penyiapan infrastruktur olahraga adaptif, serta koordinasi dengan K/L terkait seperti Dinas Sosial dan DISPORA untuk program afirmatif atlet Papua Barat di ajang nasional dan internasional.



Rekomendasi Strategis Papua Sehat

1. Konsolidasi *Stakeholders*

Situasi Darurat Kesehatan; Forum Koordinasi, Memerlukan upaya-upaya *EXTRAORDINARY*

2. Sasaran Harus Menyentuh OAP

Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan OTSUS harus menyentuh sasaran OAP

3. *Mandatory Spending*, Anggaran Kesehatan Otsus dan sumber anggaran lainnya

Mandatory Spending terkait anggaran yang bersumber dari dana Otsus dan sumber anggaran lainnya.

4. *Tatakelola Jaminan Kesehatan Daerah*

Diperlukan *tatakelola jaminan kesehatan daerah*, untuk memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional yang selama ini dilaksanakan oleh BPJS

5. *Pengawasan Khusus Terhadap Penyerapan Anggaran Kesehatan Otsus*

Diperlukan *Pengawasan Khusus Terhadap Penyerapan Anggaran Kesehatan Otsus*

1

Sinkronisasi & Harmonisasi Program Pembangunan Daerah

Seluruh program daerah wajib selaras dengan RIPP 2022–2041 dan RAPP 2025–2029. Pemda perlu menyusun rencana lima tahunan yang mengacu Asta Cita Presiden sebagai panduan operasional.

2

Penguatan Pendanaan Sektor Kesehatan dan Pendidikan di Papua

Tingkatkan porsi Dana Otsus dan DAK afirmasi untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan dasar di wilayah 3T, termasuk logistik medis, insentif nakes, dan sarana pendidikan.

3

Peningkatan Dukungan Lintas Kementerian/Lembaga

K/L pusat (Kemenhub, ESDM, PUPR, Kemendagri, Kemenkeu, KPK, Bappenas) harus hadir secara nyata di Papua melalui program afirmatif, alokasi anggaran khusus, dan pendampingan teknis berkelanjutan.

Berbagai kendala sistemik berikut menghambat percepatan pembangunan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat dan perlu menjadi prioritas penanganan bersama:

Kesehatan

- Angka stunting 15–30%, jauh dari target nasional 14%
- Malaria, TB, HIV, sifilis masih tinggi; imunisasi rendah
- Pemenuhan nakes baru 40–60%; banyak pustu rusak & puskesmas tanpa dokter
- Layanan rujukan mahal; beberapa RS kabupaten masih Tipe D

Pendidikan

- Harapan Lama Sekolah di sebagian besar kabupaten masih di bawah 10 tahun
- 50% sekolah di Papua Barat berstatus swasta kekurangan guru PPPK

Ekonomi & Infrastruktur

- Koperasi Merah Putih (KDMP) belum optimal; pendampingan kelembagaan lemah

Tata Kelola & Data

- Sinkronisasi data & pelaporan (ASIK, ASPAK, PKG, BNBA) masih lemah
- Realisasi program belum sebanding penyerapan anggaran di beberapa daerah
- Transfer Dana Otsus sering tersendat; koordinasi lintas OPD belum maksimal

PERAN BPP DALAM MEMBUKA SUMBATAN

BP3OKP Papua Barat • Februari 2026

BP3OKP berperan sebagai penghubung (bridge), pendamping (facilitator), dan advokat kebijakan antara pemerintah pusat, K/L, pemerintah daerah, dan masyarakat Papua.

Koordinasi & Advokasi

- Mengawal tindak lanjut Pertemuan Gubernur se-Tanah Papua: Berita Acara Kesepakatan lintas 6 provinsi

Fasilitasi & Mediasi

- Memfasilitasi mediasi hak ulayat Bandara Rendani antara masyarakat adat, Otoritas Bandara, dan pemerintah daerah
- Menjadi jembatan dialog Forum Ekonomi Papua Produktif dengan kebijakan RIPPP dan RAPP

Penguatan Tata Kelola

- Memfasilitasi Rapat Penguatan Kapasitas Otsus bersama Kemendagri, KPK, Kemenkeu, dan Bappenas
- Mendorong sinkronisasi RPJMD/RPJPD daerah dengan RIPPP dan RPJMN 2025–2029
- Memfasilitasi FGD penyaluran TKD & Dana Desa bersama DJPb untuk percepatan pencairan

Pembangunan SDM

- Mendampingi Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar & Menengah 2026 untuk suara Papua di tingkat pusat
- Mengawal pengembangan SSH (Sekolah Sepanjang Hari) sebagai Program Quick Win RAPP 2025–2029
- Mendukung NPCI Papua Barat: tindak lanjut disposisi Wakil Presiden RI untuk atlet paralimpik Papua

Makna Strategis

BP3OKP Papua Barat, POKJA Papua Sehat
menunjukkan peran nyata sebagai
pendamping dan fasilitator percepatan pembangunan
Otonomi Khusus, memastikan setiap program dan
kebijakan berdampak langsung bagi masyarakat Papua.

— *Semangat Kolaborasi BP3OKP*